



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Apt. Pranoto Telp. (0554) 2022140 Fax. (0554) 2022140
Tanjung Redeb

BAB. I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).

2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

3. Nama Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Berau yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau ditunjang dengan unsur-unsur Organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- c. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- d. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan (Wajib/Pilihan)

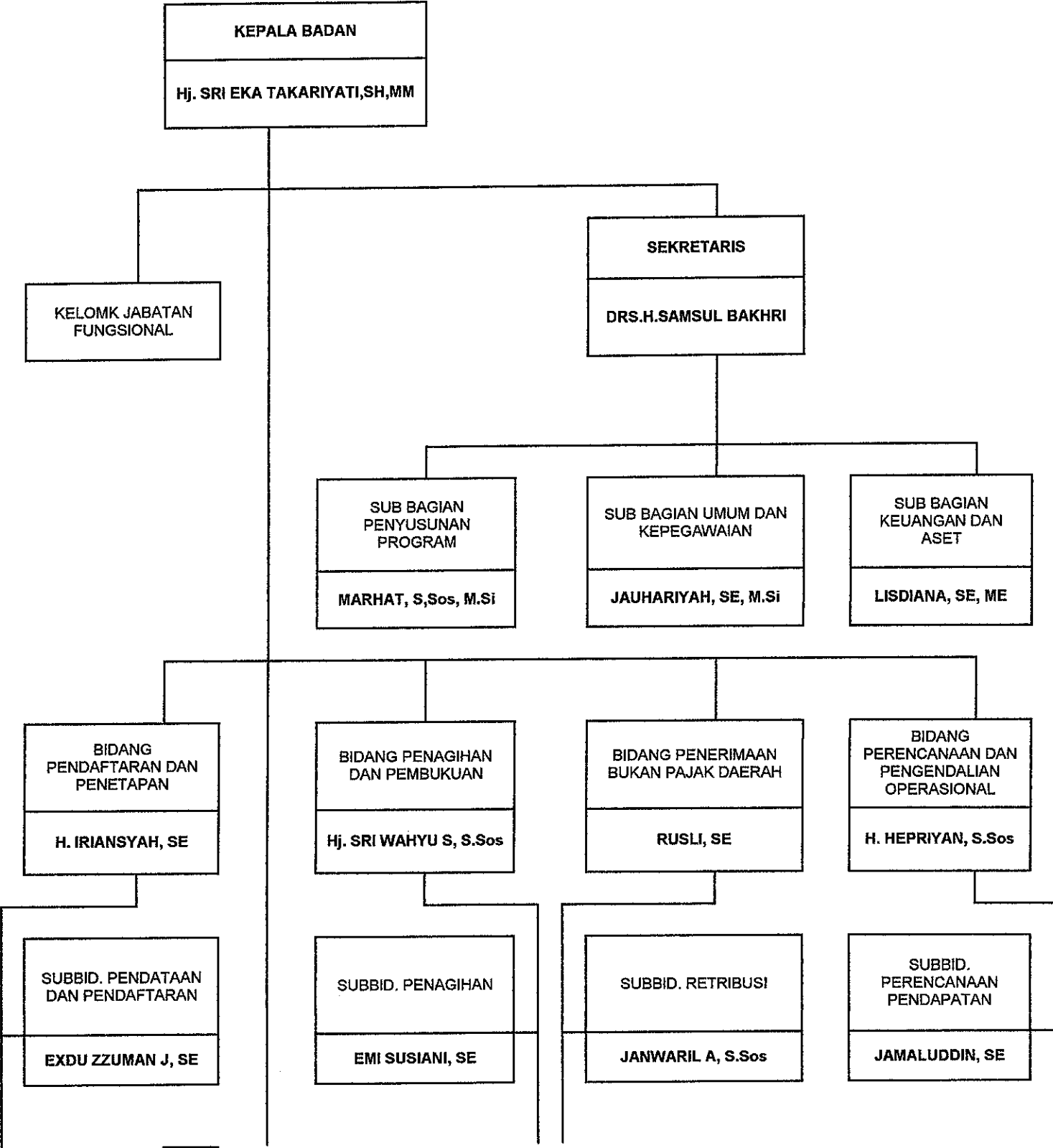
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

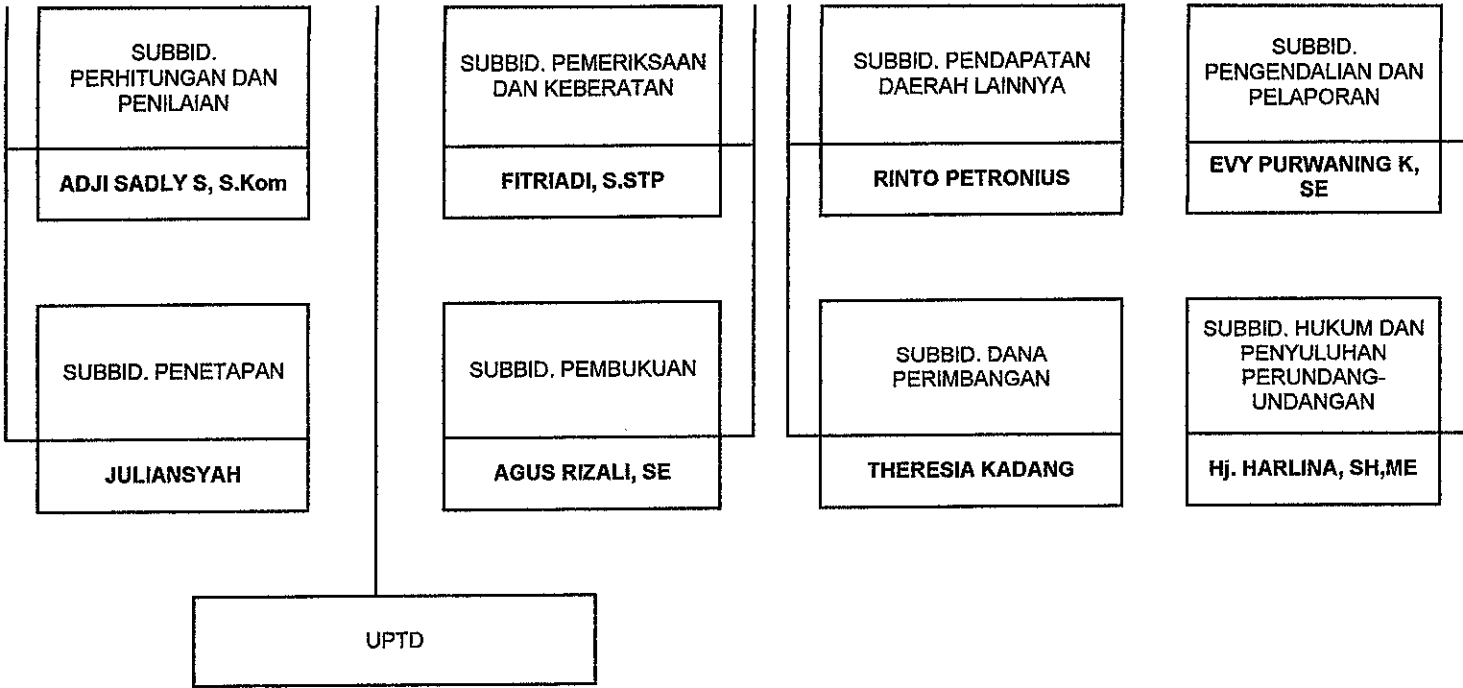
5. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Per 31 Desember 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Berau

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BERAU





6. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia berjumlah 45 orang, sesuai daftar urut kepangkatan sebagai berikut dalam Tabel 2 :

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA GOL			PENDIDIKAN		AGAMA	USIA	
			GOL/RUANG	TMT GOL	ESELON	NAMA JAB	TMT JAB	TAHUN	BULAN	TAHUN	NAMA	LLS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Hj.Sri Eka Takarlayti, SH.,MM Tanjung Redeb 08 Juni 1968	19651212 199403 2 008	IV/c	1-Apr-18	II.b	Kepala Badan	11-Okt-19	30	00	Pra Jabatan ADUM ADUMLA Diklat PIM III Diklat PIM II	1993 1997 1999 2007 2016	Pasca Sarjana	2002	Islam	54
2	Drs. Samsul Bakhri Tanjung Redeb 15 April 1963	19630415 199301 1 001	IV/a	1-Apr-09	III.a	Sekretaris	1-Jan-17	26	0	Pra Jabatan ADUM ADUMLA Diklat PIM III	1992 1996 1998 2001	Sarjana	1989	Islam	56
3	H. Hepriyan, S.Sos Tanjung Redeb 07 Juli 1970	19700707 199703 1 003	IV/a	1-Oct-09	III.b	Kabid. Perencanaan Dan Pengendalian Operasional	1-Jan-17	21	5	Pra Jabatan ADUM ADUMLA Diklat PIM III	1994 2000 2000 2009	Sarjana	1994	Islam	47
4	Hj. Sri Wahyu Suprihatin, S.Sos 22 Juni 1971	19710622 199803 2 004	IV/a	1-Oct-15	III.b	Kabid. Pendaftaran dan Penetapan	1-Jan-17	20	05	Pra Jabatan Adum	1998 2002	Sarjana	2014	Islam	48

5	Hj.Harlina,SH, ME Tonyamang 31 Desember 1968	19681231 199803 2 022	IV/a	01-Oct-19	IV.a	Kasubbbid. Hukum dan Penyuluhan Perundang - Undangan	11-Jan-17	21	10	Diklat PIM III	2011	Sarjana Pasca Sarjana	1992 2018	Islam	51
6	Marhat, S.Sos, M.Si Banjarmasin 10 Januari 1974	19740110 200012 1 002	IV/a	1-Oct-19	IV.a	Kasubbag. Penyusunan Program	1-Jan-17	16	3	Pra Jabatan Diklat PIM IV	2001 2004	Pasca Sarjana	2016	Islam	45
7	Rusli, SE Tanjung Redeb 18 Oktober 1967	19671018 198902 1 001	III/d	1-Oct-08	III.b	Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Operasional	7-May-17	24	6	ADUM Kursus Bendaharawan Diklat Pemegang Kas	1999 1992 2004	Sarjana	1997	Islam	51
8	H. Iriansyah, SE Tanjung Redeb 07 November 1967	19671107 199503 1 003	III/d	1-Oct-09	IV.a	Kasubbbid. Pemeriksaan dan Keberatan	31-Dec-19	26	7	Pra Jabatan ADUM ADUMLA Auditor Muda	1996 2000 2000 2013	Sarjana	1997	Islam	51
9	Janwaril Adhatulahad, S.Sos Tanjung Redeb 13 Januari 1974	19740113 199803 2 005	III/d	1-Oct-07	IV.a	Kasubbbid. Retribusi	11-Jan-17	20	5	Pra Jabatan ADUM	1998 2002	Sarjana	1997	Islam	44
10	Emi Susiani, SE Samarinda 01 Juli 1963	19630701 198601 2 005	III/d	1-Oct-08	IV.a	Kasubbbid. Penagihan	11-Jan-17	27	8	Pra Jabatan ADUM ADUMLA	1986 1996 2000	Sarjana	1997	Islam	55
11	Theresia Kadang	19630527 199203 2 003	III/d	1-Apr-11	IV.a	Kasubbbid. Dana	11-Jan-17	24	5	Pra Jabatan	1993	Sarjana Muda	1988	Katholik	55

12	Malakiri 27 Mei 1963	19720414 200012 1 002	III/d	1-Apr-15	IV.a	Perimbangan Kasubbid. Perencanaan Pendapatan	11-Jan-17	20	6	Kursus Bendaharawan ADUM	1993 1999	2001	Sarjana	Islam	46
13	Jamaluddin,SE Samarinda 14 April 1972														
	Evy Purwaning Kusumastuti, SE Magelang 07 Agustus 1979	19790807 199803 2 002	III/d	1-Apr-16	IV.a	Kasubbid. Pengendalian dan Pelaporan	11-Jan-17	15	4	Pra Jabatan Diklat PIM IV	1998 2016	2003	Sarjana	Islam	39
14	Lisdiana, SE, ME Gunung Tabur 31 Juli 1977	19770731 199803 2 001	III/d	1-Oct-17	IV.a	Kasubbag. Keuangan dan Aset	11-Jan-17	18	2	Pra Jabatan Diklat PIM IV	1998 2016	2003 2018	Sarjana Pasca Sarjana	Islam	41
15	Juliansyah Tanjung Redeb 12 Februari 1963	19630212 198909 1 002	III/d	1-Oct-17	IV.a	Kasubbid. Penetapan	11-Jan-17	23	11	Pra Jabatan ADUM	1989 2000	1984	SMAN	Islam	55
16	Agus Rifali, SE Samarinda 25 Mei 1975	19750523 200212 1 005	III/d	1-Apr-18	IV.a	Kasubbid. Pembukuan	11-Jan-17	18	3	Pra Jabatan Diklat PIM IV	2003 2015	2005	Sarjana	Islam	43
17	Adji Sady Saputera, S.kom Gunung Tabur 08 Maret 1972	19720308 200604 1 015	III/c	1-Apr-14	IV.a	Kasubbid. Perhitungan dan Penilaian	11-Jan-17	15	6	Pra Jabatan Diklat PIM IV	2007 2016	1997	Sarjana	Islam	46
18	Exdu Zzuman J, SE Samburakat	19750414 200701 1 023	III/c	1-Apr-15	IV.a	Kasibbid. Pendataan dan Pendaftaran	11-Jan-17	15	9	Pra Jabatan Diklat Juru Sita Pajak	2008 2008	1999	Sarjana	Islam	43

[illegible]

38	Abdul Muis Tarakan 02 Februari 1970	19820111 200901 1 003	II/c	01-Apr-17	Pengelola Data Adminis trasi dan Verifikasi	01-Apr-17	14	11	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam	36
39	Syahroni Effendi Berau 11 Januari 1982	19770530 200901 1 002	II/c	01-Oct-17	Pengolah Data dan Informasi Penilaian	01-Oct-17	14	1	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam	41
40	Sukarno Sei Bebanir 15 Juli 1978	19780715 200901 1 000	II/c	01-Oct-17	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak Retribusi	01-Oct-17	13	8	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam	40
41	Asbiansyah Sungai Meriam 11 Agustus 1970	19700811 201001 1 003	II/c	01-Apr-18	Pengadministrasi Penerimaan	01-Apr-14	14	8	Prajabatan	2011	SMA	1998	Islam	48
42	Irma Wiraniah Tanjung Redeb 14 Agustus 1974	19740814 201001 2 005	II/c	01-Apr-18	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi	01-Apr-14	14	0	Prajabatan	2011	SMA	1993	Islam	44

43	Jarot Triaji, SE Batu Ampar 20 April 1979	19790420 201001 1 018	II/c	01-Apr-18	Analisis Penagihan Pajak	01-Apr-14	14	0	Prajabatan	2011	SARJANA	2016	Islam	39
44	Adi Setiawan Tanjung Redeb 28 Oktober 1985	19851028 201001 1 014	II/c	01-Apr-18	Pengadministrasian Umum	2-Jul-18	14	0	Prajabatan	2011	SMA	2003	Islam	33
45	Herliansyah Berau 20 Agustus 1982	19820820 201001 1 032	I/c	01-Apr-18	Operator Mesin	01-Apr-14	14	9	Prajabatan	2013	SMP	2008	Islam	36

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada tahun 2019 APBD Kabupaten Berau menganut anggaran surplus / defisit. Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Berau dapat terlihat dalam tabel berikut :

1. Program , Kegiatan dan Anggaran Bapenda tahun 2019

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.113.900.000,00
	a)	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00
	b)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395.600.000,00
	c)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	245.000.000,00
	d)	Penyediaan jasa administrasi keuangan	190.581.000,00
	e)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	142.840.000,00
	f)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00
	g)	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00
	h)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.000.000,00
	i)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.799.000,00
	j)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.000.000,00
	k)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00
	l)	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00
	m)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,00
	n)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000,00
	o)	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96.080.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		155.000.000,00
	a)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00
	b)	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	5.000.000,00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		200.000.000,00
	a)	Bimtek Implementasi perundang-undangan	200.000.000,00

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		77.500.000,00
	a)	Sosialisasi Kinerja program SKPD	60.000.000,00
	b)	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	17.500.000,00
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		3.117.100.000,00
	a)	Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	470.000.000,00
	b)	Penagihan pajak daerah	513.000.000,00
	c)	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	499.100.000,00
	d)	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	200.000.000,00
	e)	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	110.000.000,00
	f)	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	1.010.000.000,00
	g)	Optimalisasi Retribusi Daerah	180.000.000,00
	h)	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	135.000.000,00
6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		815.000.000,00
	a)	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	815.000.000,00
Jumlah			7.478.500.000,00

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019.

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	215.211.192.729,00	225.680.047.070,44	104,86%
2	Dana Perimbangan	1.852.931.880.897,76	2.017.500.150.736,00	108,88%
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	726.725.821.036,60	670.834.600.659,46	92,31%
	Jumlah	2.794.868.894.663.36	2.914.014.798.465,90	104,26%

(menunggu hasil Rekon)

3. Realisasi Pelaksanaan Program,Kegiatan dan Anggaran Bapenda 2019

Badan Pendapatan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.478.500.000,00 yang terbagi dalam 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 86,16% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 6.443.710.799,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.478.500.000,00.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan berserta capaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. **3.113.900.000,00** dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.798.959.777,00 dengan persentase 89,89%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal Bapenda .Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal Bapenda .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi Rp. 137.827.500,00.- atau 91,89 %.
- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeler dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100 %

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 154.327.142,00 atau 77,16 %

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Sosialisasi Kinerja program SKPD tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 60.000.000,00 terealisasi Rp. 56.915.000,00.- atau 98,19 %.
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 17.500.000,00 terealisasi Rp. 16.308.300,00 atau 93,19 %.

5) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. sebesar Rp. 3.117.100,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.715.697.813,00 atau 87,12%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah

- a. Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
Kegiatan Penggalan Potensi Pajak Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp

470.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 420.819.456,00 atau 89,54 %. Dari Anggaran tersebut capaian target kinerja 2,226 WP/WR , dapat terealisasi sebanyak 2.450 WP/WR atau 110,06 % .

b. Penagihan Daerah

Kegiatan Penagihan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 513.000,00 terealisasi Rp. 436.734.190,00 atau 85,13 %. Target kinerja kegiatan ini sebesar 38,90 Milyar, dan dapat terealisasi 75 Milyar atau 192,8 %.

c. Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 499.100.000,00 terealisasi Rp. 393.824.650,00 atau 78,91 %. target kinerja 30 WP/WR, terealisasi 50 WP/WR atau 166,67 %, .

d. Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer

Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer tahun 2019 dengan anggaran Rp 200.000.000,00 realisasi Rp. 191.198.895,00 atau 95,60 %. adapun target kinerja sebesar 1,40 Terliyun , dapat terealisasi 2,017 Terliyun atau 144,07 %.

e. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 110.000.000,00 realisasi Rp. 108.419.523,00 atau 98,56% dan target kinerja 5 raperda/raperbup , realisasi 11 raperda/raperbup atau 220 %.

f. Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah

Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 1.010.000.000,00 realisasi Rp. 870.455.635,00 atau 86,18 % dan target kinerja 13 Kecamatan, realisasi 13 Kecamatan atau 100 %.

6) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

a. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 815.000.000,00 realisasi Rp. 556.675.267,00 atau 68,30 % dan target kinerja 3 sistem, realisasi 3 sistem atau 100 %.

4. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai

berikut :

- a) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
- d) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
- e) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Berau dapat dijabarkan solusinya sebagai berikut :.

- a) Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;
- b) Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c) Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;
- d) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

B A B III

PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tidak Melaksanakan Tugas Perbantuan.

B A B IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antara Daerah

Dalam tahun 2019 Kerja sama antar daerah Badan Pendapatan Kabupaten tidak ada/belum pernah dilaksanakan.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG TANJUNG REDEB TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH Dengan nomor : 970/208.a/BAPENDA-E/2019 dan nomor 0953/SPK/BPD-TJR/III/2019.
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG TANJUNG REDEB TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH Dengan nomor : 970/688/BAPENDA-E/2019 dan nomor 3438/PRJ/BPD-TJR/III/2019.
- c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan Kejaksaan Negeri Berau. Nomor pihak pertama : 59.2/03-PRJJ/BKPDT/2017 dan nomor pihak kedua : B-809/Q.4.14/Gs/05/2017.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau.

b. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal antara lain dengan :

- BPN
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb

Dengan adanya koordinasi Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi Vertikal dapat :

- Tercapainya penerimaan Pajak Negara dan Pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.
- Tercapainya peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di wilayah Kabupaten Berau

B A B V

PRESTASI YANG DIRAIH

1. Prestasi tingkat Nasional

- Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak ada Prestasi tingkat Nasional

2. Prestasi tingkat Provinsi

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak ada Prestasi tingkat Propinsi

3. Prestasi dari Lembaga Lain

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak ada Prestasi dari Lembaga Lain

B A B VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga LKPj ini memiliki nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil kinerja dan pengelolaan anggaran yang telah dicapai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Berau yang berkelanjutan dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dari Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat . LKPj dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat

Akhir kata, Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan pendapatan daerah .

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau,**

Hi. SRI EKA TAKARIYATI, SH,MM

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19651212 199403 2 008

B A B VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga LKPj ini memiliki nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil kinerja dan pengelolaan anggaran yang telah dicapai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Berau yang berkelanjutan dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dari Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat . LKPj dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat

Akhir kata, Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan pendapatan daerah .

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau,**

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH,MM

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19651212 199403 2 008

B A B VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga LKPj ini memiliki nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil kinerja dan pengelolaan anggaran yang telah dicapai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Berau yang berkelanjutan dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dari Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat . LKPj dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat

Akhir kata, Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan pendapatan daerah .

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

↓ **Kepala Badan Pendapatan Daerah** ↗
Kabupaten Berau,

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH,MM

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19651212 199403 2 008